Midang
eISSN: 2986-657X
Vol. 4, No. 3, Oktober 2026: 133 - 137

MEMETAKAN POTENSI DAN HAMBATAN PARIWISATA DI DESA CITENGAH, KABUPATEN SUMEDANG

Cicu Finalia*, Kamelia Gantrisia, Dewi Ratnasari, Dian Ekawati, Genita Cansrina, dan Rima Ayu Wulandari
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran
E-mail: c.finalia@unpad.ac.id

ABSTRAK. Pariwisata perdesaan sering dipandang sebagai jalur penguatan ekonomi lokal, tetapi manfaatnya bergantung pada tata kelola dan kapasitas kelembagaan setempat. Desa Citengah di Kabupaten Sumedang memiliki beragam daya tarik wisata alam dan budaya, namun sebagian besar dimiliki perseorangan dan pengelolaannya belum terkoordinasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memetakan potensi, hambatan, dan kebutuhan pengembangan pariwisata desa pada semester pertama pendampingan Kelompok Penggiat Pariwisata. Metode yang digunakan adalah konsultasi dan mediasi berbasis pendampingan partisipatif, dengan pengumpulan data melalui diskusi kelompok terarah, survei lapangan, diskusi dengan pengelola destinasi, dan dokumentasi, yang dianalisis secara deskriptif-tematik. Hasil menunjukkan empat temuan. Pertama, kepemilikan objek wisata terfragmentasi. Kedua, Curug Gorobog berada dalam kewenangan bersama Perum Perhutani, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, dan pemerintah desa, tetapi belum memiliki tim manajemen khusus. Ketiga, koordinasi antarpemangku kepentingan perlu diperkuat. Keempat, destinasi yang telah dikelola aktif masih membutuhkan peningkatan fasilitas, promosi digital, serta paket wisata edukatif dan berkemah. Pembahasan menunjukkan bahwa tantangan utama bersifat kelembagaan, bukan kekurangan daya tarik. Simpulannya, pendampingan tahun pertama diarahkan pada fasilitasi mediasi antarpemangku kepentingan dan penyusunan proposal proyek percontohan wisata edukasi. Karena data masih terbatas pada tahap awal, dampak terhadap kesejahteraan warga belum dapat dinilai.

Kata kunci: pariwisata perdesaan; wisata edukasi; tata kelola pemangku kepentingan; pendampingan masyarakat; Desa Citengah

ABSTRACT. *Rural tourism is often seen as a pathway to strengthening local economies, but its benefits depend on local governance and institutional capacity. Citengah Village in Sumedang Regency holds diverse natural and cultural attractions, yet most are individually owned and not coordinated. This community service activity aimed to map the potentials, constraints, and development needs of village tourism during the first semester of assisting the village tourism group. The methods were consultation and mediation within a participatory assistance approach, with data collected through a focus group discussion, a field survey, a discussion with a destination manager, and photographic documentation, and analysed descriptively and thematically. Four findings emerged. First, ownership of tourist attractions is fragmented. Second, Curug Gorobog falls under the shared authority of the state forestry company, the regional natural resources conservation agency, and the village government, yet has no dedicated management team. Third, coordination among stakeholders needs strengthening. Fourth, destinations that are already actively managed still need better facilities, digital promotion, and structured educational and camping packages. The discussion shows that the main challenge is institutional rather than a lack of attractions. In conclusion, first-year assistance is directed at facilitating stakeholder mediation and drafting an educational tourism pilot project proposal. Because the data are limited to an early stage, impacts on residents' welfare cannot yet be assessed.*

Keywords**:** *rural tourism; educational tourism; stakeholder governance; community assistance; Citengah Village*

PENDAHULUAN

Pariwisata perdesaan sering diposisikan sebagai jalur diversifikasi ekonomi lokal. Namun, literatur kritis mengingatkan bahwa label "berkelanjutan" atau "berbasis masyarakat" tidak otomatis menghasilkan manfaat bagi warga. Hasilnya bergantung pada siapa yang mengendalikan sumber daya, bagaimana keputusan diambil, dan seberapa kuat kapasitas kelembagaan lokal (Hall, 2019; Higgins-Desbiolles, 2018). Dangi dan Jamal (2016) menekankan bahwa pariwisata berbasis masyarakat perlu dipahami bersama prinsip pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar sebagai bentuk partisipasi warga. Lee dan Jan (2019) menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan persepsi dan pemberdayaan komunitas lokal, sedangkan Moscardo dkk. (2017) menghubungkan pariwisata dengan modal sosial di komunitas destinasi sehingga jejaring antaraktor menjadi pokok persoalan, bukan pelengkap.

Konteks pascapandemi menambah urgensi ini. Studi tentang dampak pandemi menunjukkan kerentanan sektor pariwisata dan mendorong diskusi tentang pemulihan yang lebih tangguh (Gössling dkk., 2021; Hall dkk., 2020; Sigala, 2020). Di sisi lain, teknologi digital mengubah cara destinasi dipasarkan dan dikonsumsi (Buhalis dkk., 2019), termasuk melalui peran pemengaruh media sosial yang memengaruhi keputusan perjalanan (Pop dkk., 2022). Bagi desa wisata, hal ini berarti promosi digital menjadi kebutuhan sekaligus tantangan kapasitas.

DOI: https://doi.org/10.24198/midang.v4i3.64130

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menempatkan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia (Republik Indonesia, 2009).

Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, memiliki sejumlah daya tarik wisata alam dan budaya. Dokumentasi tim mencatat Puteri River Inn, Khalana, Kampung Karuhun, budidaya lebah madu trigona, Wisata Kabuyutan Nabawadatala, dan Bumi Air, selain Curug Gorobog. Sebagian besar objek wisata tersebut dimiliki perseorangan. Curug Gorobog memiliki karakter berbeda karena kawasannya berada dalam kewenangan bersama beberapa pihak, sementara pengelolaan hariannya masih terbatas.

Upaya pengelolaan yang teridentifikasi dari diskusi dengan Kelompok Penggiat Pariwisata (Kompepar) Desa Citengah berasal dari pemerintah desa dan Karang Taruna, yang terlibat dalam pengelolaan harian dan pelayanan wisatawan di Curug Gorobog. Pada kegiatan ini, Kompepar menyampaikan kebutuhan untuk mengembangkan proyek percontohan wisata edukasi dengan arahan dan pendampingan tim Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Program ini merupakan bagian dari skema Desa Binaan dalam kerangka "Unpad Berdampak" dengan tema Mengemas Identitas Lokal untuk Penguatan Ekonomi Kreatif Desa, dan dirancang tiga tahun, dengan peta wisata digital interaktif serta penguatan literasi media sosial sebagai arah jangka panjang. Arah kegiatan tahun pertama disesuaikan dengan hasil diskusi kelompok terarah (FGD) awal dan survei lapangan.

Artikel ini bertujuan memaparkan temuan awal pendampingan, yaitu potensi, struktur pengelolaan, hambatan, dan kebutuhan pengembangan pariwisata Desa Citengah. Kontribusinya adalah dokumentasi pemetaan awal yang dapat menjadi rujukan bagi pendampingan desa wisata serupa, bukan pembuktian efektivitas suatu intervensi.

METODE

Kegiatan dilaksanakan di Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, pada 19 Juni 2026. Sasaran awal pendampingan adalah 10 anggota Kompepar Desa Citengah. Kegiatan diawali dengan penerimaan oleh Kepala Desa, penandatanganan surat oleh Kepala Desa, dan sambutan Kepala Desa. Pendekatan yang digunakan adalah pendampingan partisipatif dengan dua metode utama.

Konsultasi. Tim berperan sebagai pendamping keilmuan yang menyediakan jasa konsultasi bagi Kompepar. Kebutuhan kelompok dipetakan terlebih dahulu sebagai dasar penyusunan proposal proyek percontohan wisata edukasi.

Mediasi. Tim menempatkan diri sebagai fasilitator komunikasi antara Dinas Pariwisata Kabupaten Sumedang, Pemerintah Desa Citengah, dan Kompepar untuk persoalan yang memerlukan jasa institusi pemerintah, khususnya pengelolaan Curug Gorobog. Pada semester pertama, mediasi baru berada pada tahap persiapan, yaitu pemetaan kewenangan dan kebutuhan pihak-pihak terkait.

Teknik pengumpulan dan analisis data. Data dikumpulkan melalui empat teknik. Pertama, FGD awal bersama ketua, sekretaris, dan perwakilan Kompepar untuk menggali potensi pariwisata, masalah, tantangan, dan usulan solusi. Kedua, survei lapangan di Puteri River Inn dengan pemetaan aspek geospasial, aksesibilitas, daya tarik wisata, fasilitas, dan status pengelolaan. Ketiga, diskusi dengan pihak Puteri River Inn. Keempat, dokumentasi foto kegiatan dan beberapa objek wisata di Desa Citengah. Catatan FGD dan survei dianalisis secara deskriptif-tematik dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema potensi, hambatan, dan kebutuhan (Braun & Clarke, 2019, 2021).

Keterbatasan. Data berasal dari satu rangkaian kegiatan, satu destinasi yang disurvei, dan peserta dari kelompok penggerak pariwisata. Suara wisatawan, pemilik objek wisata lain, dan warga di luar Kompepar belum terwakili, sehingga temuan bersifat awal dan tidak digeneralisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Potensi Wisata dan Cakupan Data

Tabel 1 merangkum daya tarik wisata yang tercatat selama kegiatan beserta cakupan datanya. Di antara semuanya, hanya Puteri River Inn yang disurvei secara terstruktur dan Curug Gorobog yang dibahas mendalam dalam FGD. Objek lain baru terdokumentasi melalui foto lapangan.

Tabel 1. Daya tarik wisata Desa Citengah yang tercatat pada tahap pertama

Objek wisata	Cakupan data
Puteri River Inn	Disurvei; dikelola aktif; memiliki penginapan, restoran, area berkemah, dan sungai
Curug Gorobog	Dibahas dalam FGD; kewenangan bersama; belum ada tim manajemen khusus
Khalana; Kampung Karuhun; budidaya lebah madu trigona (KTH Lebah Madu Pasundan); Wisata Kabuyutan Nabawadatala; Bumi Air	Terdokumentasi melalui foto lapangan; belum dipetakan secara rinci

Sumber: Dokumentasi dan laporan kemajuan tim PPM (2026)



Gambar 1. Kantor Desa Citengah

Kepemilikan yang Terfragmentasi

FGD menunjukkan bahwa sebagian besar objek wisata di Desa Citengah dimiliki perseorangan. Implikasinya, pengembangan pariwisata tingkat desa tidak dapat bertumpu pada satu pengelola, melainkan membutuhkan pola koordinasi yang mempertemukan para pemilik. Temuan ini sejalan dengan argumen bahwa persoalan inti pariwisata berbasis komunitas terletak pada tata kelola dan relasi antaraktor (Dangi & Jamal, 2016; Moscardo dkk., 2017).

Kepemilikan perseorangan tidak otomatis menjadi masalah. Destinasi yang dikelola aktif, seperti Puteri River Inn, justru memperlihatkan potensi nyata. Persoalan utamanya adalah belum adanya mekanisme bersama yang menghubungkan satu objek dengan objek lain dan dengan desa.

Curug Gorobog: Kewenangan Berlapis tanpa Manajemen Khusus

Curug Gorobog berbeda dari objek lain karena bukan milik perseorangan. Secara administratif dan hukum, kawasannya berada dalam kewenangan bersama Perum Perhutani, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat, dan Pemerintah Desa Citengah (Tabel 2). Perum Perhutani dan BBKSDA Jawa Barat berwenang atas kawasan hutan dan lahan, sedangkan Pemerintah Desa dan Karang Taruna terlibat dalam pengelolaan harian dan pelayanan wisatawan. Menurut peserta FGD, pengelolaan selama ini terbatas dan belum didukung tim manajemen khusus yang profesional, sehingga potensinya belum dimanfaatkan optimal bagi kesejahteraan warga.

Tabel 2. Pihak yang terkait dengan Curug Gorobog

Pihak	Peran berdasarkan hasil FGD
Perum Perhutani	Kewenangan atas kawasan hutan dan lahan
BBKSDA Jawa Barat	Kewenangan atas kawasan hutan dan lahan
Pemerintah Desa Citengah	Kewenangan bersama; pengelolaan harian dan pelayanan wisatawan
Karang Taruna	Pengelolaan harian dan pelayanan wisatawan
Dinas Pariwisata Kabupaten Sumedang	Pihak yang akan difasilitasi dalam mediasi (rencana)
Kompepar Desa Citengah	Penggagas kebutuhan proyek percontohan wisata edukasi

Sumber: Laporan kemajuan PPM (2026), diolah penulis

Situasi ini khas dalam literatur tata kelola, yakni kewenangan terbagi di antara banyak aktor sementara tanggung jawab operasional tidak jelas (Bramwell dkk., 2017; Hall, 2019). Dalam kondisi demikian, peran perguruan tinggi yang paling masuk akal adalah fasilitator komunikasi, bukan pengambil keputusan. Hal ini selaras dengan arah tahun pertama, yaitu memfasilitasi mediasi antara Dinas Pariwisata Kabupaten Sumedang, Pemerintah Desa Citengah, dan Kompepar.

Perlu dicatat bahwa anggapan ketiadaan tim manajemen sebagai penyebab belum optimalnya potensi Curug Gorobog bersumber dari persepsi peserta FGD. Data kunjungan, pendapatan, atau perbandingan dengan destinasi lain belum tersedia untuk menguatkannya, sehingga pengumpulan data tersebut menjadi agenda tahap berikutnya.



Gambar 2. FGD dengan Kompepar

Kebutuhan Koordinasi Antarpemangku Kepentingan

Temuan ketiga menunjukkan perlunya koordinasi antara Pemerintah Desa, Kompepar, Karang Taruna, pemerintah daerah, dan pihak lain yang berwenang atas kawasan wisata. Dalam kerangka pengabdian, hal ini mengubah pertanyaan awal. Pertanyaannya bukan lagi pelatihan apa yang dibutuhkan kelompok, melainkan kesepakatan apa

yang perlu dibangun agar pelatihan dan produk wisata memiliki saluran pelaksanaan. Dengan demikian, luaran seperti peta wisata digital baru akan berguna setelah ada kesepakatan mengenai kewenangan dan pengelolaan.

Puteri River Inn: Fasilitas, Promosi Digital, dan Produk Wisata

Survei menunjukkan bahwa Puteri River Inn berpotensi sebagai ekowisata, wisata kuliner, dan lokasi fotografi. Destinasi ini dikelola aktif dengan layanan penginapan, restoran, area berkemah, dan pemanfaatan sumber daya alam berupa sungai. Tiga kebutuhan teridentifikasi: peningkatan fasilitas pendukung, optimalisasi promosi digital termasuk pemanfaatan pemengaruh media sosial, serta pengembangan paket wisata edukatif dan paket berkemah sebagai alternatif untuk meningkatkan daya tarik dan kunjungan.

Kebutuhan promosi digital sejalan dengan literatur tentang peran teknologi dan media sosial dalam pemasaran destinasi (Buhalis dkk., 2019; Pop dkk., 2022). Namun, temuan ini berasal dari satu destinasi sehingga tidak dapat digeneralisasi sebagai kondisi seluruh Desa Citengah. Pemanfaatan pemengaruh juga perlu dikaji bersama risikonya, misalnya soal kepercayaan audiens dan daya dukung destinasi, yang belum dibahas pada tahap awal ini.



Gamber 3. Survei ke Puteri River Inn

Implikasi bagi Rancangan Program

Temuan di atas membentuk urutan kerja tahun pertama (Tabel 3). Pertama, tim memfasilitasi komunikasi dan mediasi untuk Curug Gorobog. Kedua, tim mendampingi penyusunan proposal pengembangan objek wisata, termasuk usulan pemanfaatan pelataran sungai di dekat Kantor Desa Citengah sebagai alternatif objek wisata alam, sehingga Kompepar dan Pemerintah Desa memiliki dokumen dasar untuk pengajuan dan pengembangan proyek percontohan wisata edukasi. Ketiga, dalam jangka lebih panjang, hasil pemetaan menjadi dasar pengembangan peta wisata digital interaktif dan penguatan literasi media sosial bagi kelompok penggerak pariwisata.

Tabel 3. Temuan awal dan tindak lanjut program

Temuan	Tindak lanjut
Kepemilikan objek wisata terfragmentasi	Pola koordinasi antara pemilik objek wisata dan desa
Curug Gorobog belum memiliki tim manajemen khusus	Fasilitasi mediasi dengan Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, dan Kompepar
Koordinasi antarpemangku kepentingan lemah	Proposal pengembangan objek wisata sebagai dasar pengajuan bersama
Destinasi aktif butuh fasilitas, promosi digital, dan produk terstruktur	Paket wisata edukatif dan berkemah; jangka panjang: peta wisata digital dan literasi media sosial

Sumber: Laporan kemajuan PPM (2026), diolah penulis

SIMPULAN

Pada semester pertama, tim PPM telah melaksanakan FGD awal bersama Kompepar, survei lapangan di Puteri River Inn, diskusi dengan pengelola destinasi, dan dokumentasi objek wisata di Desa Citengah. Kegiatan tersebut menghasilkan pemetaan potensi, hambatan, dan kebutuhan pengembangan pariwisata desa, yang menunjukkan bahwa tantangan utama lebih bersifat kelembagaan, yakni kepemilikan yang terfragmentasi, kewenangan berlapis, dan koordinasi yang lemah, daripada kekurangan daya tarik. Pada destinasi yang sudah aktif, kebutuhan bergeser ke fasilitas, promosi digital, dan penyusunan produk wisata. Tindak lanjut tahun pertama diarahkan pada fasilitasi mediasi antarpemangku kepentingan dan pendampingan penyusunan proposal proyek percontohan wisata edukasi. Karena data masih terbatas, tahap berikutnya perlu melibatkan pemilik objek wisata lain, warga, dan wisatawan, serta menetapkan indikator capaian yang terukur, misalnya jumlah kunjungan dan keterlibatan kelompok.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Citengah, Kompepar Desa Citengah, dan pengelola Puteri River Inn atas kerja sama dan keterbukaannya, serta kepada Universitas Padjadjaran atas dukungan pendanaan melalui skema PPM Desa Binaan "Unpad Berdampak" Fakultas Ilmu Budaya tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

Bramwell, B., Higham, J., Lane, B., & Miller, G. (2017). Twenty-five years of sustainable tourism and the Journal of Sustainable Tourism: Looking back and moving forward. *Journal of Sustainable Tourism, 25*(1), 1–9.

Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 11*(4), 589–597.

Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.

Buhalis, D., Harwood, T., Bogicevic, V., Viglia, G., Beldona, S., & Hofacker, C. (2019). Technological disruptions in services: Lessons from tourism and hospitality. *Journal of Service Management, 30*(4), 484–506.

Dangi, T. B., & Jamal, T. (2016). An integrated approach to "sustainable community-based tourism". *Sustainability, 8*(5), 475.

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. (2026). *Laporan kemajuan pengabdian pada masyarakat "Unpad Berdampak" 2026*. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran.

Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2021). Pandemics, tourism and global change: A rapid assessment of COVID-19. *Journal of Sustainable Tourism, 29*(1), 1–20.

Hall, C. M. (2019). Constructing sustainable tourism development: The 2030 Agenda and the managerial ecology of sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism, 27*(7), 1044–1060.

Hall, C. M., Scott, D., & Gössling, S. (2020). Pandemics, transformations and tourism: Be careful what you wish for. *Tourism Geographies, 22*(3), 577–598.

Higgins-Desbiolles, F. (2018). Sustainable tourism: Sustaining tourism or something more? *Tourism Management Perspectives, 25*, 157–160.

Lee, T. H., & Jan, F.-H. (2019). Can community-based tourism contribute to sustainable development? Evidence from residents' perceptions of the sustainability. *Tourism Management, 70*, 368–380.

Moscardo, G., Konovalov, E., Murphy, L., & McGehee, N. G. (2017). Linking tourism to social capital in destination communities. *Journal of Destination Marketing & Management, 6*(4), 286–295.

Pop, R.-A., Săplăcan, Z., Dabija, D.-C., & Alt, M.-A. (2022). The impact of social media influencers on travel decisions: The role of trust in consumer decision journey. *Current Issues in Tourism, 25*(5), 823–843.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*.

Sigala, M. (2020). Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. *Journal of Business Research, 117*, 312–321.